

KOMODIFIKASI KONFLIK SOSIAL PAPUA DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL

Yusuf Syibly Ramadhan¹, Puspitasari²

Program Studi Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Global
Universitas Indonesia
Email: Yusuf.syibly@ui.ac.id

ABSTRAK

Hoaks merupakan sebuah informasi yang dimanipulasi dengan tujuan tertentu, di Papua pada tahun 2019 persebaran informasi hoaks isu rasisme menyebar luas di media sosial dan memicu kerusuhan di berbagai wilayah Papua. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, data diolah melalui penggalian, penelusuran buku-buku, surat, kabar, majalah, jurnal, dan observasi media sosial serta catatan lainnya yang dapat mendukung penelitian untuk melihat bagaimana fenomena komodifikasi konflik Papua yang kemudian disajikan dalam bentuk informasi hoaks serta membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Hasilnya ditemukan bahwa komodifikasi konflik Papua terutama isu rasisme kemudian dikemas dalam bentuk informasi hoaks menggunakan narasi permusuhan atau NKRI VS Papua yang kemudian menimbulkan dampak ancaman terhadap keamanan nasional.

Kata Kunci: Hoaks, Keamanan Nasional, Komodifikasi, Media Sosial

COMMODIFICATION OF PAPUA SOCIAL CONFLICTS IN SOCIAL MEDIA IN NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE

ABSTRACT

Hoaxes are information manipulated for a specific purpose, in Papua in 2019 the spread of hoax information on the issue of racism was widespread on social media and triggered riots in various parts of Papua. This study uses a qualitative descriptive method, the data is processed through extracting, tracing books, newspapers, newspapers, magazines, journals, and social media observations and other notes that can support research to see how the phenomenon of the commodification of the Papuan conflict is then presented in the form of hoax information. as well as make descriptions, descriptions or paintings in a systematic, factual and accurate manner regarding the facts, characteristics and relationships between the phenomena being investigated. The results found that the commodification of the Papuan conflict, especially the issue of racism, was then packaged in the form of hoax information using hostility narratives or NKRI VS Papua which then caused a threat to national security..

Keywords: Hoax, National Security, Commodification, Social Media

Korespondensi: Yusuf Syibly Ramadhan. Universitas Indonesia, Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Kajian Strategik dan Global. Alamat: Program Pascasarjana Multidisplin Jalan Salemba Raya No 4.: Email: Yusuf.syibly@ui.ac.id

PENDAHULUAN

COVID - 19 merupakan virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang dan terlihat seperti penyakit flu. COVID – 19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan, Di era digitalisasi saat ini, Media sosial telah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat mengingat perkembangan informasi di media sosial sangat cepat serta mudah nya akses internet dapat dinikmati berbagai kalangan, persebaran informasi tersebut tentunya sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. media sosial sama halnya dengan media masa yang merupakan tumpuan utama untuk membentuk well informed citizen atau publik yang berkualitas (Akbar, 2016). Menurut rilis survey data APJII tahun 2018 pengguna internet di Indonesia berjumlah 171,17 juta pengguna internet Indonesia (Detik, 2019). Tingginya pengguna internet di Indonesia membuka potensi kerentanan terhadap persebaran informasi bohong atau hoaks.

Allcott dan Gentzkow (2017) menyatakan bahwa media sosial sangat tepat digunakan sebagai penyebaran berita palsu atau hoaks sehingga terjadi peningkatan penggunaan media sosial yang sangat pesat dan untuk kasus Indonesia hal tersebut terbukti pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 (Lim, 2017). Sementara di Amerika Serikat, alasan yang paling dominan dalam penyebaran hoax adalah finansial. Viralisasi hoaks melalui media sosial menjanjikan insentif finansial yang menggiurkan bagi sekelompok orang (Allcott and Gentzkow, 2017).

Fenomena penyebaran berita hoax menjadi salah satu ancaman bangsa yang perlu mendapat perhatian dengan literasi media, literasi media saat ini sangatlah diperlukan dalam mengimbangi perkembangan TIK dan meminimalisir terkena dampak negatifnya (Majid, 2019). Salah satunya konflik sosial menjadi bagian dari satu diantara banyaknya hoaks yang beredar di media sosial, tidak terkecuali konflik sosial tentang Papua. dan kemudian dapat berimplikasi pada upaya penanganan konflik di Papua yang hingga saat ini masih terus menjadi permasalahan bagi pemerintah.

Isu sosial tentang papua dieksploitasi sedemikian rupa dan disebar di media sosial seperti pada kasus tahun 2019 saat terjadinya dugaan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya oleh oknum aparat keamanan yang kemudian meluas memicu aksi kerusuhan di berbagai tempat di papua (Kompas, 2019) hingga diambilnya keputusan pembatasan internet oleh pemerintah untuk mengantisipasi meluasnya konflik serta kerusuhan akibat persebaran hoaks yang dianggap dapat mengancam stabilitas keamanan nasional di Indonesia terutama wilayah Papua (CNBC, 2019). Seperti yang dikatakan Tri Legionosuko dan Setyo (2018) dalam kajiannya menyatakan hoax mampu mengancam keamanan nasional karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Keamanan nasional sangat penting untuk tetap dijaga dari berbagai ancaman akibat persebaran hoaks. Pada kasus konflik sosial di Papua, ditemukan dugaan keterlibatan pihak swasta Insight ID yang diungkap

oleh Facebook dalam keterangan resminya mengaku menghapus laman, grup, hingga akun yang didesain untuk menyerupai media lokal atau organisasi advokasi dan berdasarkan pernyataan Head Of Cybersecurity Policy Facebook, Nathaniel Gleicher menjelaskan perilaku ini mengacu pada tindakan terkoordinasi dari sejumlah laman atau yang bekerja sama untuk memperdaya orang lain tentang siapa mereka dan apa yang mereka lakukan (Katusba, 2019)

Dari fakta yang ada dan kajian penelitian terdahulu maka studi ini ingin melihat dan menjawab bagaimana komodifikasi konflik sosial Papua yang kemudian disajikan dalam bentuk informasi hoaks pada media sosial yang terjadi di Indonesia. Fokus kajian dipersempit dengan meneliti kejadian persebaran informasi hoaks isu rasisme yang menyebabkan kerusuhan di Papua tahun 2019. Kajian ini juga melihat dampak dari komodifikasi konflik tersebut dalam perspektif keamanan nasional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada bagaimana fenomena komodifikasi informasi hoaks konflik sosial Papua terkait isu rasisme yang terjadi pada tahun 2019. Allcott and Gentzkow (2017) mendefinisikan hoaks sebagai informasi yang sengaja bisa menyesatkan pembaca. Hoaks dapat bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dengan informasi palsu sehingga pembaca mengambil tindakan sesuai dengan isi informasi tersebut.

Hoaks atau informasi bohong memiliki unsur framing didalamnya dan dilakukan untuk menonjolkan salah satu sisi dari sebuah berita atau informasi, framing merupakan model sederhana dari hoaks yang menurut Peter L Berger dan Erving Govmant dalam Goni (2019) digunakan untuk kepentingan tertentu dalam media dengan cara menyeleksi dan atau mengaburkan fakta dari kebenarannya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian untuk mencari fakta dengan interpretasi yang tepat. Mempelajari masalah-masalah yang ada di masyarakat, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi atau pengumpulan data yang diolah melalui penggalan, penelusuran buku-buku, surat, kabar, majalah, jurnal, dan observasi media sosial serta catatan lainnya yang dapat mendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informasi Hoaks Pada Media Sosial Di Indonesia

Dunia maya nampak sangat menjanjikan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi tak terbatas termasuk hoaks. Berdasarkan hasil survey Mastel (Mastel) Indonesia tahun 2019 di Indonesia yang dilakukan secara online dalam kurun waktu 28 Februari hingga 15 Maret 2019 dan direspon oleh 941 responden menghasilkan bahwa 34,6 % responden menerima hoaks setiap hari dengan Tiga ragam bentuk hoaks yang

sering diterima adalah: Tulisan 70,7%, foto dengan caption palsu 66,3% dan Berita/foto/video lama diposting ulang 69,2% dan sosial media tetap menjadi saluran penyebaran tertinggi sebesar 92,40% (Mastell, 2019). Boese dalam Gopala Krishna dkk (2018), mendefinisikan hoax sebagai penipuan yang melibatkan respon publik. Boese menulis bahwa hoax adalah kebohongan yang berhasil menyedot perhatian dan imajinasi publik. Sementara Sekor & Walsh menemukan bahwa hoaks adalah alat yang digunakan untuk menyerang lawan, kekuasaan (Gopala Krishna, 2018).

Ketua Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) berpendapat bahwa hoaks adalah rekayasa informasi untuk menutupi informasi yang sebenarnya, dengan kata lain hoaks merupakan upaya memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya atau sebagai tindakan mengaburkan informasi dengan cara membanjiri media dengan pesan yang salah. Tujuan dari hoaks adalah untuk membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan kebingungan (Rismanta, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hoaks merupakan bagian dari bentuk manipulasi informasi yang kemudian dapat mempengaruhi publik dengan tujuan menyerang ataupun mengharapkan respon dari publik demi tujuan tertentu.

Penyebaran Hoaks mempresentasikan pertukaran simbol kebahasaan verbal maupun visual yang digunakan untuk mengkonstruksi pandangan tertentu dari permasalahan yang dibahas. Edelman (1964) menyebutkan terdapat dua jenis simbol yang digunakan dalam praktik politik simbolisme: simbol referensial dan simbol kondensasi (Arnhart, 1985). Sistem referensial adalah sistem yang terkait dengan elemen obyektif dari situasi dan objek tertentu sementara simbol kondensasional adalah simbol yang menimbulkan emosi dan reaksi subjektif tertentu terhadap suatu situasi objek (Gopala Krishna, 2018).

Pada kasus Indonesia salah satu proses produksi hoaks yang paling banyak mendapatkan perhatian adalah kasus produksi informasi hoaks oleh Postmetro.info yang pernah menunjukkan sikap politik secara eksplisit menentang pemerintah dengan tema utamanya yaitu invasi TKA Ilegal China di Indonesia, lalu kemudian pemilik situs tersebut mendapatkan uang sekitar Rp.25.000.000 s.d Rp.30.000.000 per bulan dari periklanan (Lukmantoro, 2018). Dari kasus tersebut dapat dilihat bagaimana produksi informasi hoaks di Indonesia menjanjikan hal baru yaitu pendapatan fantastis setiap bulannya hanya dengan mengeksploitasi informasi yang kemudian dapat diakses oleh setiap kalangan.

Persebaran hoaks di Indonesia berkaitan erat dengan buzzer atau kelompok yang secara sengaja mengamplifikasi suatu konten atau isu di media sosial. Penelitian Universitas Oxford tahun 2019 oleh Samantha Bradshaw dkk menyatakan bahwa Indonesia menjadi satu dari 70 negara yang menggunakan pasukan siber atau buzzer untuk sejumlah kepentingan sepanjang tahun 2019 yang digunakan oleh politisi, partai politik, dan kalangan swasta. Buzzer di Indonesia menggunakan disinformasi dan memanipulasi media untuk menyesatkan pihak yang menjadi target serta digunakan untuk memperkuat konten yang ada di media sosial (Bradshaw, 2019).

Hoaks diproduksi dengan tujuan tertentu, gambaran dan tujuan dibuatnya berita hoaks untuk mempengaruhi citra seseorang atau suatu kelompok di mata masyarakat (Widiyanti, 2020). Persebaran hoaks yang ada di Indonesia juga didukung oleh keterlibatan buzzer, Pada awalnya, buzzer dilibatkan oleh korporat untuk mempromosikan produk. Namun ketika terjadi keterlibatan buzzer di Indonesia dalam peristiwa politik menimbulkan citra dan pemaknaan negatif khalayak terhadap buzzer. Buzzer mendapat stigma negatif sebagai pihak yang dibayar untuk memproduksi konten negatif di media sosial (Mustika, 2019). Menurut Camil, buzzer merupakan entitas individu atau akun yang memiliki kemampuan amplifikasi pesan dengan cara menarik perhatian dan/atau membangun percakapan dan bergerak dengan motif tertentu (Camil, 2017).

Dari fenomena yang dapat kita lihat, hoaks di Indonesia sengaja digunakan untuk memanipulasi masyarakat kemudian disebar secara massif menggunakan buzzer untuk mendapatkan respon publik demi tujuan atau motif tertentu.

Hoaks Isu Rasisme Papua Tahun 2019

Berbagai macam informasi yang tidak benar / hoax beredar di kalangan masyarakat sehingga memunculkan adanya permasalahan sosial dan bahkan berujung pada konflik sosial. Hal ini juga terjadi di wilayah Indonesia Timur pada tahun 2019. Konflik sosial terjadi di wilayah Provinsi Papua, yang saat itu dipicu oleh masalah isu rasisme.

Peristiwa yang terjadi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, menjadi titik awal adanya permasalahan konflik sosial yang terjadi di wilayah Papua. Kejadian tersebut bermula dari jatuhnya bendera merah putih yang merupakan lambang negara ke dalam selokan di depan Asrama Mahasiswa Papua di Kota Surabaya. Peristiwa tersebut dianggap sebagai tindakan sengaja yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua yang selanjutnya membuat sejumlah Organisasi Massa (Ormas) melakukan aksi unjuk rasa di depan Asrama tersebut. Aksi tersebut terjadi karena para mahasiswa Papua tersebut dianggap telah melakukan kegiatan makar (Lokataru, 2019).

Selanjutnya pihak aparat kepolisian melakukan tindakan pengamanan terhadap sejumlah mahasiswa Papua yang ada di dalam asrama. Pada saat itulah terdengar adanya ucapan / nyanyian "monyet" dari masyarakat dan pengunjung rasa kepada para mahasiswa Papua tersebut yang terekam dalam sebuah videos yang pada akhirnya tersebar melalui media sosial di seluruh pelosok negeri, termasuk juga di wilayah Provinsi Papua (Law-Justice, 2020).

Adanya video tersebut, menyebabkan kemarahan para mahasiswa Papua yang berada di Kota Studi lainnya di Indonesia. Hal ini juga menimbulkan reaksi dari masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Papua dengan melakukan sejumlah aksi unjuk rasa dengan menganggap peristiwa di Surabaya tersebut merupakan aksi rasisme terhadap orang Papua. Penyebaran video tersebut juga dinarasikan oleh Veronika Koman (Aktivis HAM Papua) dengan membuat sebuah tulisan di dalam laman Facebook-nya, Peristiwa 16 Agustus 2019, tersebut bertepatan "Pekan Anti-Rasisme West Papua".

Pasca viralnya video tersebut, muncul berbagai postingan hoaks yang disebar di berbagai platform media sosial seperti Youtube, Twitter, Facebook, dan Instagram. Menanggapi hal tersebut pihak kepolisian menetapkan beberapa tersangka yaitu Veronica Koman (Liputan6, 2019), Tri Susanti (Suara, 2019), dan Andria Adiansah (Detik, 2019) yang dianggap terbukti melakukan penyebaran hoaks di media sosial.

Komodifikasi Konflik Sosial Papua Dalam Bentuk Hoaks Pada Media Sosial

Komodifikasi memiliki berkaitan dengan kata komoditas, jika komoditas adalah kata benda yang dapat dijual dan mendapatkan keuntungan, maka komodifikasi adalah sebuah proses untuk menjadikan benda atau jasa menjadi sebuah komoditas (M. Fahrudin, 2016). Komoditas dan Komodifikasi adalah dua hal yang memiliki hubungan objek dan proses dan merupakan satu diantara banyaknya faktor kapitalisme global. Dalam ekonomi politik media komodifikasi adalah bentuk penguasaan media selain strukturasi dan spasialisasi (Ketut, 2016).

Vincent Mosco, dalam bukunya *The Political Economy of Communication* (2009:132), mendefinisikan komodifikasi sebagai proses mengubah nilai pada suatu produk yang tadinya hanya memiliki nilai guna kemudian menjadi nilai tukar (nilai jual) dimana nilai kebutuhan atas produk ini ditentukan lewat harga yang sudah dirancang oleh produsen. Komodifikasi merupakan cara kapitalis dengan membawa akumulasi tujuan kapitalny atau secara sederhana ialah suatu perubahan nilai fungsi atau guna menjadi suatu nilai tukar. Terdapat 3 kategori dalam Komodifikasi yaitu : komodifikasi isi, komodifikasi khalayak dan komodifikasi cybernetic (Widodo, 2015).

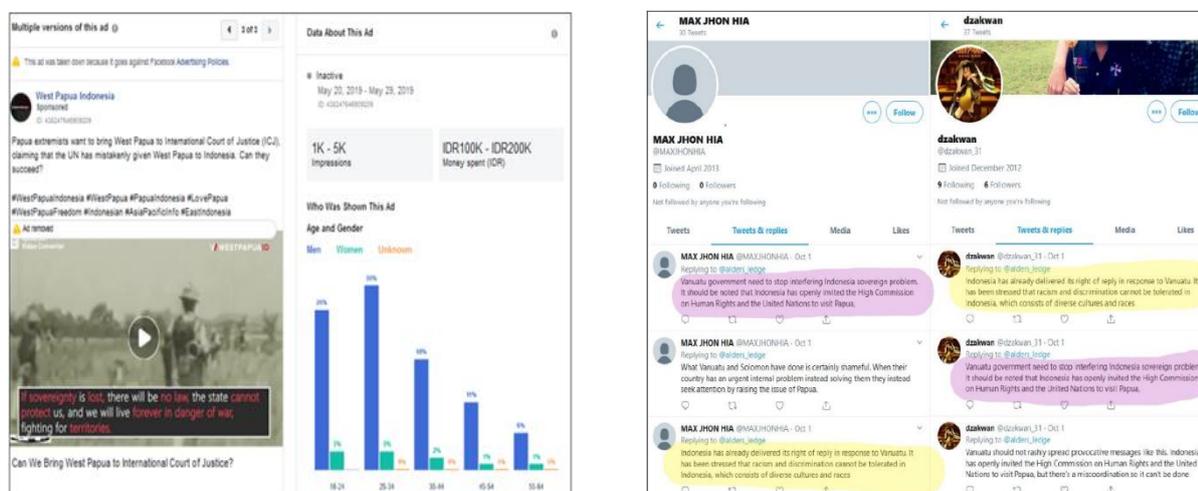
Komodifikasi isi merupakan proses mengubah pesan dari sekumpulan data ke dalam sistem makna yang kemudian dapat dipasarkan.

Komodifikasi Khalayak merupakan kemampuan sedia menghasilkan sebuah proses yang memungkinkan media menjajakkan sejumlah khalayak sebagai konsumen

Komodifikasi Cybernetic dibagi menjadi 2 bagian yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik adalah tinjauan layanan jasa rating khalayak oleh media sementara ekstrinsik adalah proses komodifikasi yang menjangkau seluruh kelembagaan pendidikan, informasi pemerintah media dan budaya yang diharapkan menjadi pendorong bagi khalayak sehingga tidak semua orang dapat mengakses produk media.

Jika dikaitkan dengan konflik sosial Papua tahun 2019 maka terjadi komodifikasi terhadap konflik sosial yang kemudian disajikan dalam bentuk informasi hoaks dan kemudian disebar di media sosial, transformasi nilai dilakukan pada perubahan isi narasi informasi dan disebarluaskan pada publik atau khalayak, hal tersebut dapat terlihat dari keterlibatan oknum swasta yang melakukan penyebaran informasi hoaks konflik sosial isu rasisme Papua yaitu Insight ID, pada saat itu Facebook menghapus laman bernama " Papua West" dan " West Papua Indonesia". Unggahan akun-akun palsu tersebut ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan narasi-narasi permusuhan atau Papua VS Indonesia. Meski pengelola laman berupaya menyamarkan identitas, Facebook menemukan keterkaitan antara akun-akun palsu dengan perusahaan komunikasi InsightID asal Indonesia.

Laporan Facebook menyebutkan, InsightID mengelola 69 akun Facebook, 42 laman, dan 34 akun Instagram. Ada sekitar 410.000 akun mengikuti satu atau lebih FB Pages ini dan sekitar 120.000 akun mengikuti setidaknya satu akun Instagram ini. InsightID membelanjakan uang sekitar \$300.000 (Setara Rp 4,2 miliar) untuk iklan Facebook berbayar (Kompas. 2019), Adapun beberapa temuan komodifikasi konflik yang disajikan dengan narasi informasi hoaks sebagai berikut :



Sumber : Hasil Investigasi Australian Strategic Policy Institute dan BBC Investigator 2019

Komodifikasi terjadi karena spesialisasi dan strukturasi. Spesialisasi merupakan proses ketika media massa dan teknologi komunikasi dapat mengatasi hambatan jarak geografis. Sementara strukturasi dapat diartikan sebagai sebuah proses pembentukan relasi sosial terutama kelas sosial, gender, dan ras (Puspaningrum, 2018). Dalam kaitannya dengan tayangan pada media sosial, komodifikasi adalah konten siaran sebagai produk yang nilainya ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan produsen dalam kasus Papua yaitu oknum berkepentingan yang menginginkan adanya kerusuhan dan tuntutan kemerdekaan Papua lebih meluas, diubah menjadi produk yang nilainya ditentukan oleh apa yang dihasilkan oleh pasar atau dalam hal ini Orang Asli Papua (Zefanya, 2012)

Adanya komodifikasi konflik sosial isu rasisme Papua tahun 2019 yang disebarkan menjadi sebuah informasi hoaks di media sosial tidak lepas dari inovasi teknologi yang merepresentasikan bentuk klasik dari perluasan ranah komoditas. Tapi dengan kemunculan luar biasa ekspansi dari informasi teknologi, komputer, dan Internet, bidang baru komodifikasi muncul. Informasi teknologi memungkinkan sekarang setiap orang untuk menyimpan, mentransfer, menyalin, menganalisis dan mengubah informasi, dengan biaya yang semakin rendah (Fleissner, 2009).

Dari fakta dan kejadian yang ada serta bagaimana fenomena buzzer yang ada di Indonesia dimotifasi oleh faktor finansial, terlihat bagaimana konflik sosial kemudian dikemas kedalam sebuah konten yang diiklankan dan menjadi komoditas seperti yang dikatakan Serra (2020) dengan mencontohkan perusahaan Benetton United Colours pada studinya dan menemukan bahwa periklanan modern telah diradikalisasi menjadi forum politik yang eksplisit dengan menghilangkan gambar produk dari iklannya dan menampilkan

permasalahan sosial, sehingga masalah sosial menjadi perwujudan produk dan bertransformasi menjadi komoditas.

Komodifikasi Hoaks dan Ancamannya Terhadap Keamanan Nasional

Aksi anarkis akibat komodifikasi hoaks tersebut memunculkan banyak kerugian materil dan juga menimbulkan korban jiwa di Kota Jayapura dan Wamena. Bahkan, kejadian tersebut juga akhirnya memicu terjadinya konflik sosial baru akibat banyaknya masyarakat Non Orang Asli Papua (OAP) yang mengalami korban jiwa dan juga materil sehingga memunculkan perlawanan terhadap peserta aksi unjuk rasa.

Kerusuhan dan anarkisme serta konflik sosial yang terjadi di Papua pada tahun 2019 lalu merupakan salah satu dampak negatif komodifikasi konflik sosial dalam bentuk informasi hoaks yang di fasilitasi media sosial. Bute (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa media sosial dapat memfasilitasi aktivisme namun dapat juga menimbulkan konflik sosial terutama ketika hoaks dan disinformasi menyentuh isu yang sensitif (dalam hal ini konflik sosial Papua) dan ketika dihadapkan dengan keamanan maka media sosial dapat mempengaruhi keamanan nasional maupun global dengan cara positif, negatif, dan untuk kasus Indonesia terjadi disinformasi yang mempengaruhi kohesi sosial (Lee, 2019).

Proses komodifikasi yang terjadi memang tidak dapat dihindari, namun terjadinya komodifikasi pada konteks masyarakat jejaring memberikan beberapa penyesuaian pada konsep komodifikasi itu sendiri. Sumber daya praktis berupa teknologi yang lebih mudah diakses akibat proses kapitalisasi perangkat menjadi awal dari proses komodifikasi yang terjadi di tengah masyarakat jejaring. Tidak hanya itu, konteks masyarakat pada era digital yang pada dasarnya merupakan pekerja intelektual yang memiliki nilai tukar; membuat masyarakat memiliki otonomi pada derajat tertentu dalam sebuah ekonomi informasi dimana suatu ide telah direifikasi, bersifat publik, dan terkomodifikasi (Nurita, 2017)

Komodifikasi konflik sosial rasisme Papua dalam bentuk hoaks juga merupakan bentuk propaganda oleh oknum tertentu yang bertujuan menciptakan instabilitas keamanan nasional, dalam kajian Alfi dan Surya (2020) tentang propaganda isu rasisme Papua di media sosial menunjukkan bahwa isu propaganda rasisme menjadi penyebab keresahan massa dan konflik sosial di Papua dan Papua Barat; dan isu propaganda rasisme berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan menghambat proses pembangunan nasional yang sangat membutuhkan prasyarat bagi stabilitas keamanan nasional. Ketika dihadapkan dengan isu mengenai Papua berarti keamanan nasional berhadapan dengan sebuah Ideologi yang dalam hal ini adalah separatisme, sementara Ideologi di internet adalah fenomena fasisme, rasisme, ekstrimisme sayap kanan, nasionalisme, klasisme, seksisme, anti semitisme, dll secara online. Ideologi di internet cenderung menggunakan sarana visual dan tabloidasi (penyederhanaan, menggunakan sedikit kata, emosionalisasi, skandalisasi, polarisasi, banalisasi, manipulasi, fabrikasi, dll) (Fuchs, 2018). Hal inilah yang juga memicu masifnya persebaran hoaks terkait konflik sosial di Papua untuk kemudian dikomodifikasi.

Saat ini ancaman tidak lagi berbicara dari negara ke negara tetapi bisa terjadi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh aktor non negara dan ditunjukkan kepada negara (Pangestu, 2017). Sebagai sebuah konsep,

keamanan telah mengalami evolusi pemaknaan yang luas dan berkembang mengikuti perkembangan dinamika perubahan zaman yang menurut seorang ahli keamanan, Barry Buzan (1991) membagi sektor keamanan ke dalam lima bidang; militer, politik, lingkungan, ekonomi dan sosial.

Dinamika perkembangan pemahaman keamanan nasional di Indonesia terus berkembang sejak tahun 1998, adapun keamanan nasional dalam Encyclopedia of the Social Sciences mendefinisikan keamanan sebagai “kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar”. Kemampuan untuk menghadapi semua itu bukan hanya bertolak dari kemampuan militer, tetapi juga kemampuan Element Of National Power yang lain, termasuk kapasitas pemerintahan untuk menghadapinya. Tak diragukan ancaman tertentu harus dihadapi dengan instrumen tertentu yang sesuai, efektif, efisien dan tidak menimbulkan dislokasi sosial, ekonomi, politik, ideologi (Anggoro, 2003).

Pada hakikatnya menciptakan keamanan nasional adalah bagaimana mengantisipasi ancaman nasional, untuk mendefinisikan ancaman itu dapat dibagi dalam 2 kategori yaitu ancaman militer dan nirmiliter. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan ancaman nirmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

Komodifikasi konflik sosial dalam bentuk informasi hoaks merupakan bentuk ancaman nirmiliter yang melibatkan unsur ideologi, politik, dan teknologi informasi atau siber, Caveltly (2008) mengatakan bahwa ancaman siber sebagai produk dari penggunaan infrastruktur informasi global yang tidak bertanggung jawab, ancaman di dunia maya harus dipahami sebagai bagian dari proses politik, karena dinamika, karakteristik, transformasinya dibingkai dan diinformasikan oleh agenda politik. Hoaks dalam sudut pandang keamanan nasional menjadi alat yang efektif saat ini untuk menciptakan kekacauan disebuah negara. Untuk memerangi siber hoaks, tiga pihak yang berbeda harus bekerja sama : negara, pasar, dan masyarakat sipil. Mereka harus bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah strategis yang mengancam keamanan siber (khususnya), serta keamanan dan stabilitas nasional secara umum. Dalam konteks kewenangan nasional, harus disiapkan produk hukum tertentu untuk memberikan sanksi yudikatif yang lebih tegas (Gunawan, 2019).

Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional dari ancaman hoaks, Indonesia memberlakukan ketentuan pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong diatur dalam undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) ada dua pasal yang bisa menjerat penyebar hoax yaitu pasal 14 dan pasal 15. Pasal 14 :

- 1) *“Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun”*.

- 2) *“Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.*

SIMPULAN

Kerusuhan Papua yang terjadi pada tahun 2019 merupakan salah satu dampak dari bentuk komodifikasi konflik sosial dalam bentuk hoaks oleh oknum tertentu. Konflik sosial dikemas sedemikian rupa berbeda dengan fakta atau hanya menampilkan sepenggal fakta kedalam sebuah konten dan narasi yang disebarluaskan melalui media sosial untuk menciptakan gelombang konflik yang baru. Hal ini memicu kerusuhan di berbagai wilayah di Papua yang kemudian berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional.

Walaupun proses komodifikasi konflik Papua dalam bentuk informasi hoaks tidak dapat dihindari di era globalisasi saat ini karena memiliki nilai ekonomi namun secara tidak langsung, perilaku komodifikasi tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keamanan nasional karena dapat memicu gelombang kerusuhan serta kekacauan yang diakibatkan meluasnya informasi provokatif di masyarakat. Untuk itu diperlukan sinergitas antar lembaga pemerintahan termasuk aparat keamanan di Indonesia dalam menanggulangi segala bentuk komodifikasi konflik sosial dalam bentuk hoaks di media sosial agar terciptanya konsep keamanan nasional yang strategis dan mampu bertahan dari berbagai ancaman di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Al A'ra (2015), *Dinamika Keamanan Nasional*, Jurnal Keamanan Nasional
- Anggoro Kusnanto (2003), *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum* Centre for Strategic and International Studies, Jakarta
- Akbar Arif dan Muharjono (2016), *Kualitas Informasi Politik dan Relasinya Dalam Demokrasi di Level Lokal*, Jurnal Diplomasi dan Studi Keamanan
- Barry Buzan. (1991), *People, States and Fears, An Agenda for International Security Studies in Post Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Bradshaw Samantha and Philip N Howard (2019), *The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation*, Oxford University
- Camil, Rinaldi dkk, (2017), *Di Balik Fenomena Buzzer: Memahami Lanskap Industri dan Pengaruh Buzzer di Indonesia*, Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance
- Cavelty, M.D. (2008), *Cyber Security and Threat Politics: US Efforts to Secure the Information Age*. London, New York: Routledge
- Fleissner Peter (2009), *The “Commodification” of Knowledge in the Global Information Society*
- Fuchs Christian (2018), *Propaganda 2.0 : Herman and Chomsky’s Propaganda Model in the Age of the Internet*, Big Data and Social Media
- G. .Allcott, H. and Gentzkow, M. (2017), *Social Media and Fake News in the 2016 Election*, *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 31, No. 2, pp. 211–236
- Gunawan Budi dkk (2019) *Media Sosial, Cyber Hoaks, dan Keamanan Nasional : Ancaman dan Perlindungan di Indonesia*
- JSV Gopala Krishna dkk (2018), *Social Media Threats And Protection In Cyberspace*, *International Journal of Pure and Applied Mathematics*
- Ketut Hery Sony Pratama, Saotua Marbun (2016), *Komodifikasi Penjor Sebagai Sarana Persembahyangan Umat Hindu*
- Lee Antony (2019), *Online Hoaxes, Existential Threat, And Internet Shutdown*
- Lim, M.(2017), *Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia*, *Critical Asian Studies*, Vol. 49, No. 3, pp. 411–427

- Lukmantoro Triyono (2018), Propaganda, Komodifikasi, Dan Perlawanan Atas Invasi Pekerja Ilegal China
- Majid ABD (2019), Fenomena Penyebaran Hoax Dan Literasi Bermedia Sosial Lembaga Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia
- Muhamad Fahrudin Yusuf (2016), Komodifikasi : Cermin Retak Agama Di Televisi : Perspektif Ekonomi Politik Media
- Mustika Rieka (2019), Pergeseran Peran Buzzer ke Dunia Politik Di Media Sosial
- Nurita Yessi dkk (2017), Komodifikasi Di Era Masyarakat Jejaring: Studi Kasus Youtube Indonesia, jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No.2
- Pangestu Indah Amarisari (2017), Keamanan Nasional Dalam konteks Isu-isu Global Kontemporer : Sebuah Tinjauan Hubungan Internasional
- Rajabi Alfi dan Surya Wiranto (2020), Propaganda Issues Of Racism Through Social Media To Trigger Social Violence In Papua And West Papua In 2019, Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nationalism dan Integrity e-ISSN: 2549-9459
- Rismanta Rut dkk (2017), Karakteristik Strategi Crowdsourcing Untuk Membatasi Penyebaran Hoaks Di Indonesia
- Serra (2020), United Colors Dan United Meanings: Benetton Dan Commodification Of Social Issue
- Widodo Muktiyo (2015), Komodifikasi Budaya Dalam Konstruksi Realitas Media Massa
- Widiyanti Irma (2020), Informasi Berita Hoaks Dari Perspektif Bahasa

Buku dan Laporan

- ASPI and BBC (2019), Investigating Information Operations in West Papua “A Digital Forensic Case Study Of Cross Platform Network Analysis”
- Dephan (2015), Buku Putih Pertahanan Indonesia
- Lokataru Foundation. 2019. “No. Signal: Throttling Blackouts Papua dan Papua Barat” Mini Paper
- Masyarakat Telematika Indonesia (2019), Hasil Survey Wabah Hoaks Nasional Tahun 2019
- Mosco, Vincent. (2009) . The Political Economy of Communication 2 Edition. Sage, London
- Nazir, Muhammad.1988. Metode Penelitian. Ghalia. Jakarta

Skripsi

- Puspaningrum Berliyanti (2018), Komodifikasi Seksualitas Melalui Praktik Sexting Oleh Smut Role-Player Di Media Sosial Twiter, Universitas Indonesia
- Zefanya Ronaldy (2012), Komodifikasi “Kegilaan” Toni Blank Dalam Sosial Media (Analisis Wacana Kritis Terhadap “Kegilaan” Toni Blank Pada Toni Blank Show Di Youtube), Universitas Indonesia.

Media Elektronik

- CNBC Indonesia (2019), Alasan Kominfo Blokir Internet Papua, Bukan Medsos (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190828165220-37-95443/alasan-kominfo-blokir-internet-papua-bukan-medsos/2>) diakses pada 27 Oktober 2020.
- Detik (2019), Pengguna Internet Indonesia Didominasi Milenial (<https://inet.detik.com/telecommunication/d-4551389/pengguna-internet-indonesia-didominasi-milenial>) 27 Oktober 2020.
- Detik (2019), Terkait Hoaks di Asrama Mahasiswa Papua, Polisi Tetapkan Satu Tersangka Baru (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4695044/terkait-hoaks-di-asrama-mahasiswa-papua-polisi-tetapkan-satu-tersangka-baru>) 27 Oktober 2020.
- Katusba (2019), InsightID, Salah Satu Aktor Utama Dibalik Kontroversi Papua Barat di Facebook (<https://katusba.com/fokuskatusba/insightid-aktor-utama-dibalik-kontroversi-soal-papua-barat-di-facebook/>) 27 Oktober 2020.
- Kompas (2019), Kronologi Kerusuhan di Manokwari hingga Pembakaran Gedung DPRD Papua Barat (<https://regional.kompas.com/read/2019/08/19/15400661/kronologi-kerusuhan-di-manokwari-hingga-pembakaran-gedung-dprd-papua-barat?page=all>) 27 Oktober 2020.
- Kompas (2019), Buka-bukaan soal Buzzer (4): Menelusuri Jejak InsightID, Buzzer Indonesia yang “Ditandang” Facebook (<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/09/113000465/buka-bukaan-soal-buzzer-4-menelusuri-jejak-insightid-buzzer-indonesia-yang?page=all>) 27 Oktober 2020.
- Law Justice (2020), Kronologi Peristiwa `Rasis Papua` pada 16 Agustus 2019 di Surabaya (www.law-justice.co/amp/91379/kronologi-peristiwa-rasis-papua-pada-16-agustus-2019-di-surabaya/) 27 Oktober 2020.
- Liputan6 (2019), Polisi Sudah Jerat Tiga Tersangka Kasus Papua (<https://surabaya.liputan6.com/read/4054847/polisi-sudah-jerat-tiga-tersangka-kasus-papua>) 27 Oktober 2020.

Suara (2019), Ini Hoaks yang Disebar Tri Susanti Picu Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua (<https://jatim.suara.com/read/2019/08/29/184137/ini-hoaks-yang-disebar-tri-susanti-picu-pengepungan-asrama-mahasiswa-papua>) 27 Oktober 2020